



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

NOMOR 126/KEP/E4/2026

TENTANG

**PEMBERIAN APRESIASI KEPADA DAERAH KABUPATEN/KOTA ATAS
CAPAIAN LEBIH DARI SERATUS PERSEN PADA KEGIATAN PELAYANAN
KONTRASEPSI DI WILAYAH PRIORITAS TAHUN 2026**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan keluarga berencana kepada masyarakat, perlu dilakukan pemberian apresiasi kepada Daerah Kabupaten/Kota pada kegiatan pelayanan kontrasepsi di wilayah prioritas berdasarkan penilaian hasil capaian pelayanan keluarga berencana lebih dari seratus persen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pemberian Apresiasi kepada Daerah Kabupaten/Kota atas Capaian Lebih dari Seratus Persen pada Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi di Wilayah Prioritas Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
3. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
5. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBERIAN APRESIASI KEPADA DAERAH KABUPATEN/KOTA ATAS CAPAIAN LEBIH DARI SERATUS PERSEN PADA KEGIATAN PELAYANAN KONTRASEPSI DI WILAYAH PRIORITAS TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Pemberian Apresiasi kepada Daerah Kabupaten/Kota atas Capaian Lebih dari Seratus Persen pada Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi di Wilayah Prioritas Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Apresiasi Capaian Lebih dari Seratus Persen di Wilayah Prioritas Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Apresiasi Capaian Lebih dari Seratus Persen di Wilayah Prioritas Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Daerah Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan persentase:
- a. capaian Peserta Keluarga Berencana Baru pada pelayanan Keluarga Berencana lebih dari seratus persen dari target yang telah ditetapkan;
 - b. capaian Keluarga Berencana Pascapersalinan pada pelayanan Keluarga Berencana lebih dari seratus persen dari target yang telah ditetapkan; dan
 - c. capaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang pada pelayanan Keluarga Berencana lebih dari seratus persen dari target yang telah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL



2

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 126/KEP/E4/2026
TENTANG
PEMBERIAN APRESIASI KEPADA KABUPATEN/KOTA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ATAS
CAPAIAN LEBIH DARI SERATUS PERSEN PADA KEGIATAN
PELAYANAN KONTRASEPSI DI WILAYAH PRIORITAS TAHUN 2026

PEMBERIAN APRESIASI KEPADA KABUPATEN/KOTA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ATAS
CAPAIAN LEBIH DARI SERATUS PERSEN PADA KEGIATAN PELAYANAN KONTRASEPSI DI WILAYAH PRIORITAS TAHUN 2026

NO	PENERIMA APRESIASI	PERSENTASE CAPAIAN		
		PB	MKJP	KBPP
1.	Aceh Timur	129.14%	200.98%	464.37%
2.	Aceh Utara	101.67%	137.68%	271.90%
3.	Nagan Raya	101.08%	139.02%	430.56%
4.	Kota Tangerang	247.82%	172.65%	644.27%
5.	Indramayu	188.93%	105.79%	558.95%
6.	Bekasi	116.67%	115.52%	363.42%
7.	Kota Bekasi	116.30%	117.34%	204.02%

12

8.	Cirebon	110.45%	131.57%	298.69%
9.	Kota Bogor	108.08%	170.27%	648.29%
10.	Kuningan	107.68%	139.04%	569.17%
11.	Kota Depok	102.65%	120.53%	349.37%
12.	Kota Mojokerto	125.19%	104.76%	433.33%
13.	Jepara	105.26%	156.97%	323.94%
14.	Sragen	103.94%	144.75%	255.96%
15.	Kapuas Hulu	119.37%	414.58%	323.40%
16.	Kota Baru	112.34%	198.82%	293.88%
17.	Kutai Kartanegara	113.60%	125.00%	571.04%
18.	Karimun	119.24%	131.19%	556.52%
19.	Kota Batam	113.74%	118.11%	292.42%
20.	Buru	136.64%	136.21%	412.96%
21.	Pulau Taliabu	312.70%	263.64%	557.89%
22.	Halmahera Selatan	225.15%	186.72%	650.00%
23.	Halmahera Timur	129.90%	188.46%	478.57%
24.	Halmahera Utara	120.93%	141.85%	707.32%
25.	Kota Tidore Kepulauan	120.42%	152.94%	653.33%
26.	Halmahera Tengah	113.21%	137.33%	178.57%
27.	Pulau Marotai	101.70%	139.84%	489.29%
28.	Sumbawa Barat	140.65%	190.91%	338.46%
29.	Kota Bima	137.61%	184.21%	533.333%
30.	Bima	131.89%	214.01%	483.85%
31.	Kota Mataram	100.10%	113.17%	272.92%

32.	Lembata	207.72%	150.00%	733.33%
33.	Manggarai Timur	197.42%	226.50%	728.74%
34.	Sumba Tengah	162.15%	104.79%	588.89%
35.	Rote Ndao	152.05%	107.87%	706.25%
36.	Kepulauan Yapen	102.07%	192.68%	133.63%
37.	Nabire	136.94%	351.72%	106.12%
38.	Gowa	269.02%	141.96%	455.87%
39.	Barru	129.56%	209.76%	262.22%
40.	Donggala	124.15%	130.42%	539.19%
41.	Banggai Kepulauan	122.82%	122.32%	425.81%
42.	Wakatobi	111.58%	128.26%	324.00%
43.	Kota Bau Bau	111.02%	140.42%	360.42%
44.	Bolaang Mongandow Selatan	110.78%	166.25%	827.27%
45.	Kolaka Timur	108.43%	106.25%	378.38%
46.	Kota Kotamobagu	105.37%	136.36%	326.67%
47.	Kanawe Utara	102.19%	106.06%	442.86%
48.	Lima Puluh Kota	154.74%	142.35%	779.10%
49.	Pasaman	142.92%	112.84%	388.33%
50.	Kota Bukittinggi	132.46%	133.33%	282.14%
51.	Kota Padang Panjang	130.91%	121.54%	787.50%
52.	Kota Payakumbuh	121.15%	124.21%	293.94%
53.	Kota Palembang	105.04%	123.64%	917.11%
54.	Mandailing Natal	149.18%	103.72%	892.73%
55.	Karo	130.11%	102.60%	326.36%

56.	Langkat	124.12%	113.12%	582.70%
57.	Nias	111.53%	106.28%	208.62%
58.	Labuhanbatu Selatan	110.90%	118.52%	220.39%
59.	Nias Barat	101.02%	180.34%	646.15%

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL



DEPUTI BIDANG BINA KELUARGA BERENCANA DAN
KESEHATAN REPRODUKSI,

WAHIDIN

l K